

**PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM HADIS NABI DAN
RELEVANSINYA BAGI PEMERINTAHAN MODERN**

Muhammad Izhar¹, Salsabila Azahra²

UIN Palangka Raya¹, UIN Palangka Raya²

muhammadizh4r@gmail.com¹, salsabilaazahra2809@gmail.com²

ABSTRACT

This article examines the principles of leadership in the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and their relevance to modern governance. The study focuses on the hadith prohibiting the seeking of leadership positions as recorded in Sahih al-Bukhari and Sunan al-Tirmidhi, as well as the hadith concerning the entrustment of authority to those who are unqualified. Using a library research approach with thematic (*mawḍūʿī*) analysis, this article explores the normative and contextual meanings of these hadiths. The findings indicate that these traditions contain fundamental principles of Islamic leadership, including: leadership as a divine trust (*amānah*), the necessity of competence and eligibility (*ahliyyah*), moral integrity (*ṣidq* and *ʿadālah*), rejection of ambition for power, belief in divine assistance for sincere leaders, prioritization of public welfare (*maṣlaḥah*) over rigid formalism, and accountability (*masʿūliyyah*). In the hadith perspective, leadership is not a privilege to be pursued, but a heavy trust for which one will be held accountable before both God and society. In the context of modern governance, these principles remain highly relevant, particularly in addressing public trust crises, nepotism, abuse of authority, and weak integrity among public officials.

Keywords: *Islamic leadership, Prophetic hadith, Governance ethics, Good governance.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ serta relevansinya terhadap praktik pemerintahan modern. Kajian ini berfokus pada hadis larangan meminta jabatan dalam Sahih al-Bukhari dan Sunan al-Tirmidzi, serta hadis tentang penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya. Melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis tematik (*maudhuʿi*), artikel ini mengkaji kandungan makna hadis secara normatif dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut memuat sejumlah prinsip fundamental kepemimpinan Islam, yaitu: kepemimpinan sebagai amanah ilahi, pentingnya kelayakan dan kompetensi (*ahliyyah*), integritas moral (*ṣiddīq* dan *ʿadālah*), penolakan terhadap ambisi kekuasaan, keyakinan akan pertolongan ilahi bagi pemimpin yang ikhlas, orientasi pada kemaslahatan di atas formalitas, serta tanggung jawab dan akuntabilitas. Kepemimpinan dalam perspektif hadis bukanlah hak istimewa yang diperebutkan, melainkan amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan manusia. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam menjawab krisis kepercayaan publik, praktik nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya integritas pejabat publik.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Islam, Hadis Nabi, Etika Pemerintahan.*

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap tatanan masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, organisasi, maupun negara, kepemimpinan menjadi instrumen utama dalam mengarahkan, mengelola, dan menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekadar struktur kekuasaan atau mekanisme administratif, melainkan amanah yang sarat dengan dimensi moral dan spiritual. Ia tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan fondasi normatif yang kuat mengenai etika kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan. Salah satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari (no. 6227) dan dijelaskan dalam Fathul Bari (no. 6722) memuat larangan Nabi ﷺ untuk meminta jabatan (*al-imārah*). Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa seseorang yang memperoleh kepemimpinan tanpa memintanya akan mendapat pertolongan, sedangkan orang yang memperolehnya karena ambisi permintaan akan dibiarkan memikulnya sendiri. Pesan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dibangun atas dasar ambisi pribadi, melainkan atas kelayakan, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari (no. 59) menyatakan: *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”* Hadis ini menegaskan prinsip profesionalisme dan kompetensi (*ahliyyah*) sebagai syarat mutlak dalam pengelolaan kekuasaan. Penempatan orang yang tidak kompeten dalam jabatan publik tidak hanya melanggar prinsip amanah, tetapi juga menjadi sebab rusaknya tatanan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Di tengah dinamika pemerintahan modern yang dihadapkan pada krisis integritas, praktik korupsi, nepotisme, serta rendahnya kepercayaan publik, ajaran hadis tentang kepemimpinan menjadi semakin relevan. Nilai-nilai seperti amanah, kelayakan, integritas moral, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan publik merupakan prinsip universal yang dapat menjadi fondasi etika kepemimpinan kontemporer. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi ﷺ tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai landasan konseptual dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait larangan meminta jabatan dan penegasan pentingnya kompetensi, serta menganalisis relevansinya dalam konteks pemerintahan modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep kepemimpinan Islam sekaligus menawarkan refleksi kritis bagi praktik kekuasaan di era kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks hadis Nabi Muhammad SAW beserta literatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan pemerintahan modern. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hadis-hadis kepemimpinan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah hadis-hadis tentang kepemimpinan yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Sunan al-Tirmidzi, khususnya hadis tentang larangan meminta jabatan dan hadis mengenai penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya. Adapun sumber sekunder

meliputi kitab syarah hadis, buku-buku kepemimpinan Islam, artikel jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas tata kelola pemerintahan modern (*good governance*).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menemukan konsep-konsep utama kepemimpinan dalam hadis, seperti amanah, kompetensi (*ahliyyah*), integritas moral, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Selanjutnya konsep-konsep tersebut dikontekstualisasikan dengan teori kepemimpinan modern, etika pemerintahan, serta prinsip *good governance* guna melihat relevansi dan kontribusinya terhadap praktik pemerintahan kontemporer.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Hadis Kepemimpinan

Dalam kitab Fathul Bari No. 6722 (Sahih Bukhari No. 6227):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرِ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ تَابِعَهُ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَتَابِعَهُ يُونُسُ وَبِمَاكَ بْنُ عَطِيَّةَ وَبِمَاكَ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهَشَامٌ وَالرَّبِيعُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar bin Faris, telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Al Hasan dari

Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meminta kepemimpinan, sebab jika engkau diberi kepemimpinan bukan karena meminta, kamu akan ditolong, namun jika kamu diberi karena meminta, kamu akan ditelantarkan. Jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, kemudian melihat ada yang lain lebih baik, maka lakukan yang lebih baik, dan bayarlah kafarat sumpahmu." Hadits ini diperkuat oleh Asyhal bin Hatim dari Ibnu 'Aun dan diperkuat oleh Yunus, Simak bin 'Athiyah, Simak bin Harb, Humaid, Qatadah, Manshur dan Hisyam dan Ar Rabi'.

Hadis tersebut berisi nasihat Nabi ﷺ kepada 'Abd al-Rahman bin Samurah tentang kepemimpinan dan sumpah. Secara umum, hadis ini mengandung dua pokok ajaran besar: etika dalam mencari kekuasaan dan tuntunan dalam menyikapi sumpah.

Pertama, larangan meminta jabatan.

Nabi ﷺ melarang seseorang meminta kepemimpinan atau jabatan (*al-imārah*). Larangan ini bukan berarti kekuasaan itu tercela secara mutlak, tetapi karena meminta jabatan sering lahir dari ambisi pribadi, dorongan hawa nafsu, atau keinginan akan kedudukan. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang berat, bukan kehormatan yang diburu. Seseorang yang meminta jabatan dikhawatirkan lebih terdorong oleh kepentingan diri daripada kemaslahatan umat. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi ﷺ menegaskan bahwa jika jabatan diberikan karena permintaan, orang itu akan "dibebani" (*wukila ilaiha*), yakni diserahkan pada kemampuannya sendiri tanpa pertolongan khusus dari Allah. Ini menunjukkan bahwa ambisi pribadi dapat menghilangkan keberkahan dan pertolongan ilahi.

Sebaliknya, jika seseorang diberi amanah tanpa memintanya, maka ia akan "ditolong" (*u'īna 'alaiha*). Maknanya, ketika jabatan datang sebagai amanah karena

kepercayaan dan kelayakan, bukan karena ambisi, maka Allah akan memberikan pertolongan, taufik, dan bimbingan dalam menjalankannya. Di sini terkandung prinsip bahwa kepemimpinan ideal lahir dari kelayakan (*ahliyyah*) dan kepercayaan masyarakat, bukan dari ambisi pribadi.

Kedua, tuntunan tentang sumpah.

Nabi ﷺ mengajarkan bahwa apabila seseorang telah bersumpah atas suatu hal, lalu kemudian ia melihat ada pilihan lain yang lebih baik, maka hendaknya ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar *kaffarah* sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dalam syariat adalah memilih kebaikan dan kemaslahatan, bukan terikat secara kaku pada sumpah yang ternyata menghalangi kebaikan. Sumpah bukanlah penghalang untuk berbuat lebih baik, tetapi ada mekanisme syariat (*kaffarah*) untuk menebusnya. Tapi bila melanggar sumpahnya atau melupakannya maka murka Allah lebih kejam dari apapun di dunia.

Secara keseluruhan, hadis ini menanamkan nilai penting dalam kehidupan sosial-politik dan moral: menjauhi ambisi kekuasaan, memandang jabatan sebagai amanah yang berat, serta mengutamakan kebaikan dan kemaslahatan di atas formalitas sumpah. Hadis ini juga menjadi dasar etika kepemimpinan dalam Islam, bahwa yang utama adalah integritas, tanggung jawab, dan ketulusan, bukan keinginan untuk berkuasa.

Maktabah Al Ma'arif No. 1529 (Tirmidzi 1449) disebutkan dengan redaksi yang berbeda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ

الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ
وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أَتَيْتَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتُكْفِرُ عَنْ يَمِينِكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ
عَلِيِّ وَجَابِرِ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ
وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ
وَأَبِي مُوسَى قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Ala Ash Shan'ani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Yunus ia adalah Ibnu Ubaid- berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hasan dari 'Abdurrahman bin Samurah ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Wahai 'Abdurrahman, janganlah kamu mengharap kekuasaan. Sesungguhnya jika kekuasaan itu datang kepadamu karena pengharapanmu, maka urusannya akan dibebankan kepadamu. Tetapi jika kekuasaan itu datang kepadamu bukan karena pengharapanmu, maka engkau akan mendapat pertolongan. Jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu (nadzar) kemudian melihat yang lebih baik, maka ambillah sesuatu yang lebih baik itu dan tunaikanlah kafarat untuk sumpahmu tersebut." Ia berkata, "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ali, Jabir, Adi bin Hatim, Abu Darda, Anas, 'Aisyah, Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, Ummu Salamah dan Abu Musa." Abu Isa berkata, "Hadits 'Abdurrahman bin Samurah derajatnya hasan shahih."

HR. Bukhari no. 59:

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya (kiamat)."

Hadis ini disampaikan Rasulullah ﷺ sebagai jawaban kepada seorang Arab Badui yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa hilangnya amanah dan profesionalisme merupakan salah satu tanda kiamat atau tanda kehancuran suatu urusan.

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa apabila suatu urusan, baik itu kepemimpinan, jabatan, tanggung jawab publik, maupun amanah sosial diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Ungkapan “tunggulah kiamat” bukan sekadar menunjuk pada hari kiamat secara harfiah, tetapi juga menggambarkan rusaknya tatanan kehidupan, runtuhnya keadilan, dan hancurnya sistem sosial.

Dalam hadis ini terkandung pesan bahwa setiap amanah memiliki syarat kelayakan. Seseorang yang diberi tanggung jawab harus memiliki ilmu, kemampuan, serta integritas moral. Jika jabatan diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan, kepentingan pribadi, atau praktik nepotisme, maka keputusan-keputusan yang lahir darinya cenderung tidak adil dan merugikan banyak pihak. Dari sinilah kerusakan bermula.

Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang boleh dibagi sesuka hati, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika amanah itu disalahgunakan dengan menempatkan orang yang tidak layak, maka kepercayaan publik akan hilang, keadilan meningkat, dan stabilitas masyarakat terganggu.

2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Hadis Nabi

a. Prinsip Amanah (Kepemimpinan sebagai Titipan Ilahi)

Prinsip pertama dan paling mendasar yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa kepemimpinan merupakan amanah, bukan hak istimewa atau kehormatan yang dapat diperebutkan. Nabi ﷺ secara eksplisit melarang seseorang meminta jabatan (*al-imārah*), karena permintaan tersebut mengindikasikan bahwa motivasi yang mendorong bukan kemaslahatan umat, melainkan ambisi pribadi.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah tugas (*amanah*) dan ujian dari Allah, yang pelaksanaannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota yang dipimpin, tetapi juga kepada Allah SWT. Dengan demikian, tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam bersifat ganda: horizontal-formal kepada sesama manusia dan vertikal-moral kepada Allah SWT. Konsep amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, dan ungkapan "kekuasaan adalah amanah sehingga harus dilaksanakan dengan penuh amanah pula" telah menjadi prinsip yang diakui secara luas dalam pemikiran Islam (Chanifah et al., 2024).

Amanah dalam konteks kepemimpinan mengandung makna sikap penuh pertanggungjawaban, kejujuran, dan memegang prinsip. Dalam kajian komparatif antara konsep *al-amānah* dalam al-Qur'an dan konsep *trust* dalam literatur Barat, ditemukan bahwa amanah memiliki dimensi yang lebih luas, yakni tidak hanya berorientasi pada hubungan antar manusia, tetapi juga pada ketaatan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah demi kemaslahatan Masyarakat (Herijanto, 2022). Hal ini menegaskan bahwa pemimpin yang menerima jabatan tanpa memintanya sebagaimana diajarkan dalam hadis lebih berpotensi menjalankan amanah tersebut dengan tulus dan bertanggung jawab.

b. Prinsip Kelayakan (*Ahliyyah*): Jabatan Hanya untuk Orang yang Berkompeten

Prinsip kedua yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa kepemimpinan harus

diberikan kepada orang yang layak dan kompeten (*ahl*). Hal ini diperkuat oleh hadis Bukhari no. 59 yang menyatakan: "*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya.*" Hadis ini secara tegas menegaskan bahwa penempatan orang yang tidak kompeten dalam jabatan kepemimpinan merupakan pertanda kehancuran suatu tatanan sosial.

Prinsip kelayakan ini selaras dengan konsep kepemimpinan Islam yang mensyaratkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki *fathanah* (kecerdasan dan kompetensi) sebagai salah satu dari empat sifat kenabian yang menjadi fondasi kepemimpinan profetik (Laiqkafana & Rozikan, 2023). Dalam kajian tentang kepemimpinan Qur'ani, disebutkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan profetik (*siddiq*, *amānah*, *tabligh*, dan *fatānah*) memiliki relevansi langsung dengan karakteristik kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli manajemen modern (Chanifah et al., 2024). Kompetensi (*fathanah*) menjadi syarat mutlak agar seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan adil.

Dalam konteks ini, kepemimpinan yang ideal lahir dari kelayakan (*ahliyyah*) dan kepercayaan masyarakat, bukan dari ambisi pribadi. Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menyebutkan delapan kualifikasi pemimpin, di antaranya: kecakapan intelektual, kekuatan fisik, amanah, adil, jujur, dan bijaksana (Saputra, 2022). Ketika jabatan diberikan kepada yang tidak memenuhi kualifikasi ini, maka keputusan-keputusan yang lahir darinya cenderung tidak adil dan merugikan banyak pihak, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis Bukhari no. 59.

c. Prinsip Integritas Moral (*Ṣiddiq* dan *'Adālah*)

Prinsip ketiga adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas moral

yang tinggi, yang dalam tradisi Islam dikenal dengan sifat *ṣiddiq* (kejujuran) dan *'adālah* (keadilan). Hadis tentang larangan meminta jabatan secara implisit mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang tidak terdorong oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi, melainkan oleh ketulusan dan komitmen terhadap kebenaran.

Model kepemimpinan etis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ mencakup tiga faktor utama: manusia moral (*moral person*), pengurus moral (*moral manager*), dan hamba taat (*moral vicegerent*). Elemen *moral vicegerent* atau *ubudiyah* yakni kesadaran sebagai hamba Allah yang taat merupakan ciri khas kepemimpinan etis dalam Islam yang membedakannya dari model kepemimpinan Barat (Ishak, 2011). Elemen ini memastikan bahwa integritas moral seorang pemimpin terjaga secara konsisten, karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah SWT.

Dalam kajian tentang kepemimpinan etis di sekolah Islam, ditemukan bahwa kepemimpinan etis bersumber pada nilai-nilai etika yang tertanam dalam diri pemimpin itu sendiri (Suhardi et al., 2021). Kepemimpinan yang tidak didasarkan pada internalisasi nilai-nilai moral akan cenderung menghasilkan perilaku yang tidak etis. Penelitian tentang perilaku tidak etis dalam organisasi publik menunjukkan bahwa keterampilan dan kompetensi kepemimpinan yang buruk merupakan anteseden kritis dari perilaku tidak etis (Benlahcene & Meddour, 2023), yang sejalan dengan pesan hadis bahwa pemimpin yang meminta jabatan karena ambisi pribadi akan "ditelantarkan" tanpa pertolongan ilahi.

d. Prinsip Penolakan Ambisi Kekuasaan (*Zuhd* terhadap Jabatan)

Prinsip keempat adalah penolakan terhadap ambisi kekuasaan atau *zuhd* terhadap jabatan. Nabi ﷺ secara eksplisit melarang meminta kepemimpinan, karena ambisi kekuasaan sering kali lahir dari dorongan hawa nafsu yang dapat menggelapkan nurani dan

menghilangkan keberkahan ilahi. Ini merupakan salah satu manifestasi dari sifat *zuhud*, *taqwa*, dan *tawaduk* yang menjadi elemen penting dalam konsep kepemimpinan etis berbasis sirah Nabi.

Kepemimpinan transformatif yang sejati, sebagaimana dikaji dalam konteks pendidikan Islam, bukan semata-mata kepemimpinan yang mencari jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, melainkan kepemimpinan yang berdasarkan etika religius dan tanggap terhadap perubahan sosial. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki integritas (*nafs al-muṭma'innah*) sehingga mampu beramal saleh dan mengadakan perubahan positif dalam kepemimpinannya (Fauzi, 2018). Prinsip ini selaras dengan pesan hadis bahwa jabatan yang datang tanpa diminta sebagai buah dari kepercayaan dan kelayakan yang akan mendatangkan pertolongan Allah, sementara jabatan yang diraih melalui ambisi akan menjadi beban yang harus ditanggung sendiri.

e. Pertolongan Ilahi bagi Pemimpin yang Ikhlas

Prinsip kelima adalah keyakinan bahwa Allah akan menolong pemimpin yang ikhlas dan tidak terdorong oleh ambisi pribadi. Hadis ini menegaskan: "*Jika engkau diberi kepemimpinan bukan karena meminta, kamu akan ditolong.*" Ini mengandung dimensi teologis yang mendalam: kepemimpinan yang diemban dengan ketulusan dan tanpa ambisi akan mendapatkan *tawfiq* (pertolongan) dan bimbingan dari Allah SWT.

Dalam kajian tentang konsep kepemimpinan dari sudut pandang Islam klasik, ditekankan bahwa pemimpin yang beroperasi dalam etika dan moral al-Qur'an akan dibedakan dari pengikutnya karena keunggulan nilai, pengetahuan, dan realisasi potensi laten mereka. Konsep *amānah ilāhiyyah* (amanah ilahi) yang dianugerahkan kepada manusia berkorelasi

dengan kesadaran diri (*self-realisation*) dan kesadaran spiritual (Suddahazai, 2023). Dengan demikian, pemimpin yang menerima jabatan sebagai amanah (bukan sebagai ambisi) akan lebih mampu mengaktualisasikan potensi kepemimpinannya dengan dukungan ilahi.

Prinsip ini juga tercermin dalam konsep *amanah leadership* yang dikemukakan dalam kajian etika pengelolaan keuangan negara, di mana kepemimpinan yang senantiasa menjaga amanah dan hati yang bersih karena selalu dekat dengan Allah memiliki kekuatan yang unggul dibanding model kepemimpinan konvensional. Kepemimpinan amanah bersifat *holistic*, *accepted*, dan *proven*, terbukti relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan (Briando et al., 2017).

f. Prinsip Mengutamakan Kemaslahatan (*Maṣlahah*) di atas Formalitas

Prinsip keenam terkandung dalam bagian kedua hadis tentang sumpah: mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan di atas formalitas. Nabi ﷺ mengajarkan bahwa apabila seseorang telah bersumpah atas suatu hal, lalu melihat ada pilihan yang lebih baik, maka hendaknya ia melakukan yang lebih baik dan membayar *kaffarah* sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan terikat secara kaku pada formalitas yang menghalangi kebaikan.

Dalam konteks kepemimpinan, prinsip ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus selalu berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan umat, bukan pada kepentingan pribadi atau formalitas prosedural semata. Prinsip *amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang menjadi salah satu pilar kepemimpinan Islam (Briando et al., 2017); sejalan dengan ajaran hadis ini. Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan, meskipun harus menanggung konsekuensi dari perubahan keputusan sebelumnya.

g. Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Prinsip ketujuh adalah tanggung jawab dan akuntabilitas (*mas'ūliyyah*). Hadis ini mengisyaratkan bahwa pemimpin yang meminta jabatan akan "ditelantarkan" (*wukila ilaiha*)—yakni diserahkan pada kemampuannya sendiri tanpa pertolongan khusus dari Allah. Ini merupakan bentuk akuntabilitas ilahi: seseorang yang mengambil jabatan karena ambisi harus menanggung sendiri seluruh konsekuensinya.

Dalam kajian tentang kepemimpinan etis dan kinerja karyawan di sektor publik, ditemukan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kepuasan karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Pemimpin yang etis menjadikan etika sebagai elemen eksplisit dalam agenda kepemimpinannya, termasuk melalui pemodelan perilaku etis dan sistem penghargaan yang mendorong akuntabilitas (Oladimeji & Abdulkareem, 2023). Prinsip akuntabilitas ini juga tercermin dalam hadis Nabi: "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*" (Laiqkafana & Rozikan, 2023)

Dalam konteks kepemimpinan Islam yang lebih luas, idealnya seorang pemimpin memenuhi kriteria *adil* (keadilan), *amānah* (akuntabilitas), *dakwah* (sosialitas), dan *ummah* (kolektivitas) (Indra & Kustati, 2019). Nilai dan etika kepemimpinan yang ditampilkan oleh seorang pemimpin menjadi penentu keberhasilan program-program yang dijalankannya (Kusumaningrum et al., 2017).

3. Relevansi di Pemerintahan Modern Sekarang

Salah satu tantangan terbesar pemerintahan modern adalah krisis kepercayaan publik (*public trust crisis*) terhadap institusi negara. Prinsip *amanah* yang diajarkan dalam hadis, bahwa kepemimpinan adalah titipan ilahi yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab memiliki relevansi langsung dengan konsep *public trust* dalam administrasi publik kontemporer.

Konsep *al-amānah* dalam al-Qur'an dan konsep *trust* dalam literatur Barat menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan makna: keamanan, kepercayaan, kemampuan memenuhi ekspektasi, kompetensi, dan integritas moral. Namun, *amanah* memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada hubungan antar manusia, tetapi juga pada ketaatan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah demi kemaslahatan masyarakat (Herijanto, 2022). Dalam konteks pemerintahan modern, ketika seorang pejabat publik memahami jabatannya sebagai *amanah* ilahi, bukan sekadar kontrak sosial dengan konstituen, maka motivasi intrinsiknya untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab akan jauh lebih kuat. Ini sejalan dengan temuan bahwa kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai etika internal lebih efektif dalam mencegah perilaku koruptif dibandingkan pengawasan eksternal semata.

Dalam pemerintahan modern, infrastruktur etika yang kuat (yang mencakup pedoman, pengelolaan, dan pengendalian) merupakan prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *amanah* dari hadis Nabi ﷺ memberikan fondasi spiritual bagi infrastruktur etika tersebut, menjadikannya bukan sekadar kewajiban formal tetapi juga kewajiban moral-religius yang diinternalisasi oleh setiap aparatur negara.

Larangan Nabi ﷺ untuk “meminta” jabatan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan etika rekrutmen pejabat publik dalam

pemerintahan modern. Ambisi kekuasaan yang tidak terkendali merupakan salah satu akar dari berbagai patologi pemerintahan: korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi proses seleksi, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, pemimpin yang memiliki sifat *zuhud* terhadap kekuasaan cenderung lebih fokus pada pelayanan publik daripada pada pemeliharaan kekuasaan pribadi (Suardi et al., 2021) Ini sejalan dengan konsep *servant leadership* dalam literatur manajemen kontemporer, di mana pemimpin yang efektif adalah mereka yang menempatkan kepentingan yang dipimpin di atas kepentingan diri sendiri.

Ajaran hadis tentang sumpah bahwa jika ada pilihan yang lebih baik, maka ambillah yang lebih baik dan bayarlah *kaffarah* mengandung fleksibilitas kebijakan demi kemaslahatan yang sangat relevan dengan pemerintahan modern. Dalam administrasi publik, pemimpin sering kali dihadapkan pada situasi di mana kebijakan yang telah ditetapkan ternyata tidak lagi optimal atau bahkan kontraproduktif. Kemampuan untuk merevisi kebijakan demi kebaikan public sambil tetap bertanggung jawab atas konsekuensi perubahan tersebut merupakan tanda kepemimpinan yang matang dan berorientasi pada kemaslahatan.

Prinsip *amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang menjadi salah satu pilar kepemimpinan Islam; sejalan dengan konsep responsivitas dalam administrasi publik modern: kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara dinamis dan adaptif. Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan, meskipun harus menanggung konsekuensi dari perubahan keputusan sebelumnya (Briando et al., 2017).

أَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَسْئُولُ عَلَىٰ مَا أُؤْتُوا مِنْهَا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَالْأَخْلَافُ

"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,..." (HR. Bukhari no. 2554 & Muslim no. 1829).

Hadis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya milik seorang raja, presiden, atau pejabat tinggi, tetapi merupakan tanggung jawab setiap manusia sesuai dengan perannya masing-masing. Rasulullah ﷺ memulai sabdanya dengan kata "Ala" (ketahuilah), yang menunjukkan penegasan dan pentingnya pesan ini.

Hadis ini menanamkan kesadaran bahwa setiap amanah, sekecil apa pun, akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Ia bukan kehormatan yang boleh dibanggakan, tetapi beban amanah yang harus ditunaikan dengan adil, jujur, dan penuh kesungguhan.

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan prinsip tanggung jawab universal: siapa pun kita sebagai orang tua, guru, pemimpin organisasi, bahkan terhadap diri sendiri, semua memiliki wilayah kepemimpinan. Dan setiap amanah itu kelak akan dipertanggungjawabkan, baik dalam urusan dunia maupun di akhirat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan, khususnya riwayat dalam Sahih al-Bukhari (no. 6227 dan no. 59) serta riwayat dalam Sunan al-Tirmidzi (no. 1449), dapat disimpulkan bahwa Islam meletakkan fondasi kepemimpinan pada nilai amanah, kelayakan, integritas moral, serta orientasi kemaslahatan. Kepemimpinan bukanlah hak istimewa yang boleh diperebutkan, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik

di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

Larangan meminta jabatan menunjukkan bahwa ambisi kekuasaan berpotensi menghilangkan keberkahan dan pertolongan ilahi. Sebaliknya, jabatan yang datang tanpa ambisi pribadi berdasarkan kepercayaan dan kelayakan akan disertai pertolongan Allah dan peluang lebih besar untuk dijalankan secara adil. Hadis “*apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*” menegaskan bahwa profesionalisme dan kompetensi merupakan syarat mutlak dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan suatu tatanan sosial.

Prinsip-prinsip seperti amanah, *ahliyyah* (kompetensi), *siddiq* (kejujuran), *‘adālah* (keadilan), *zuhd* terhadap jabatan, serta tanggung jawab dan akuntabilitas membentuk kerangka etika kepemimpinan Islam yang utuh. Selain itu, ajaran tentang sumpah mengajarkan fleksibilitas yang berorientasi pada kemaslahatan: ketika terdapat pilihan yang lebih baik, maka kebaikan itulah yang harus diutamakan dengan tetap memenuhi konsekuensi syariatnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis, tidak kaku, dan selalu berpihak pada kebaikan bersama.

Dalam konteks pemerintahan modern, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk menjawab krisis kepercayaan publik, praktik nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya integritas aparatur negara. Konsep amanah memberikan dimensi spiritual yang memperkuat etika publik, sementara prinsip kelayakan dan akuntabilitas sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan *good governance*. Dengan demikian, hadis-hadis tentang kepemimpinan tidak hanya menjadi pedoman moral individual, tetapi juga menawarkan landasan normatif bagi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Z. Laiqkafana and Rozikan (2023). ‘Analysis the Impact of Islamic Leadership on the Islamic Work Ethics of Pegadaian Syariah Employees’, *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3.1.
- Benlahcene, Abderrahmane and Houcine Meddour (2023). ‘How Poor Leadership Skills Elicit Unethical Behavior: Evidence From Public Organizations’, *Journal of Government and Politics*.
- Briando, Bobby. Iwan Triyuwono, and Gugus Irianto (2017). ‘Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, published online.
- Chanifah, Nur, Abu Samsudin, and Ibnu H. Ansori (2024). ‘Quranic Leadership: The Effort to Realize the Integrity of Leaders in Preventing Corruption’, *International Journal of Educational Management and Innovation*, 5.1.
- Fauzi, Ahmad. (2018). ‘Habitualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Transformatif Perspektif Kiai Hasan Mutawakkil ‘Alallah’, *Manageria Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.1.
- Herijanto, Hendy. (2022). ‘Al Amanah in Al Qur’an vs Trust: A Comparative Study’, *International Journal of Ethics and Systems*, 38.4.
- Indra, Ristapawa and Martin Kustati (2019). ‘Ethical Leadership Assessment for the Islamic Secondary School Principals’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1.
- Ishak, Suraiya. (2011). ‘Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad Saw’, *Jurnal Hadhari an International Journal*, 3.2.
- Oladimeji, Kazeem A. and Abdulrazaq K. Abdulkareem (2023). ‘Ethical Leadership and Employee Performance in the Public Sector: The

- Mediating Effects of Motivation and Satisfaction', *Journal of Government and Politics*.
- Saputra, Dodi. (2022). 'Pemimpin Dari Beberapa Tafsir', *Taqaddumi Journal of Quran and Hadith Studies*, 2.2.
- Suddahazai, Imran H. K. (2023). 'Examining the Concept of Educational Leadership From the Classical Islamic Worldview', *Khazanah Pendidikan Islam*, 5.1.
- Suhardi, Dedi and others (2021). 'Implementasi Pendidikan Karakter: Kepemimpinan Etis, Pengembangan Kapasitas Guru Dan Budaya Sekolah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18.1.